



Kementerian PPN/
Bappenas



ASEAN
INDONESIA
2023

Pemanfaatan Data Regsosek Sebagai Kelompok Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan

Riski Raisa Putra

**Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan
Pemberdayaan Masyarakat**
Kementerian PPN/Bappenas

Selasa, 19 Desember 2023



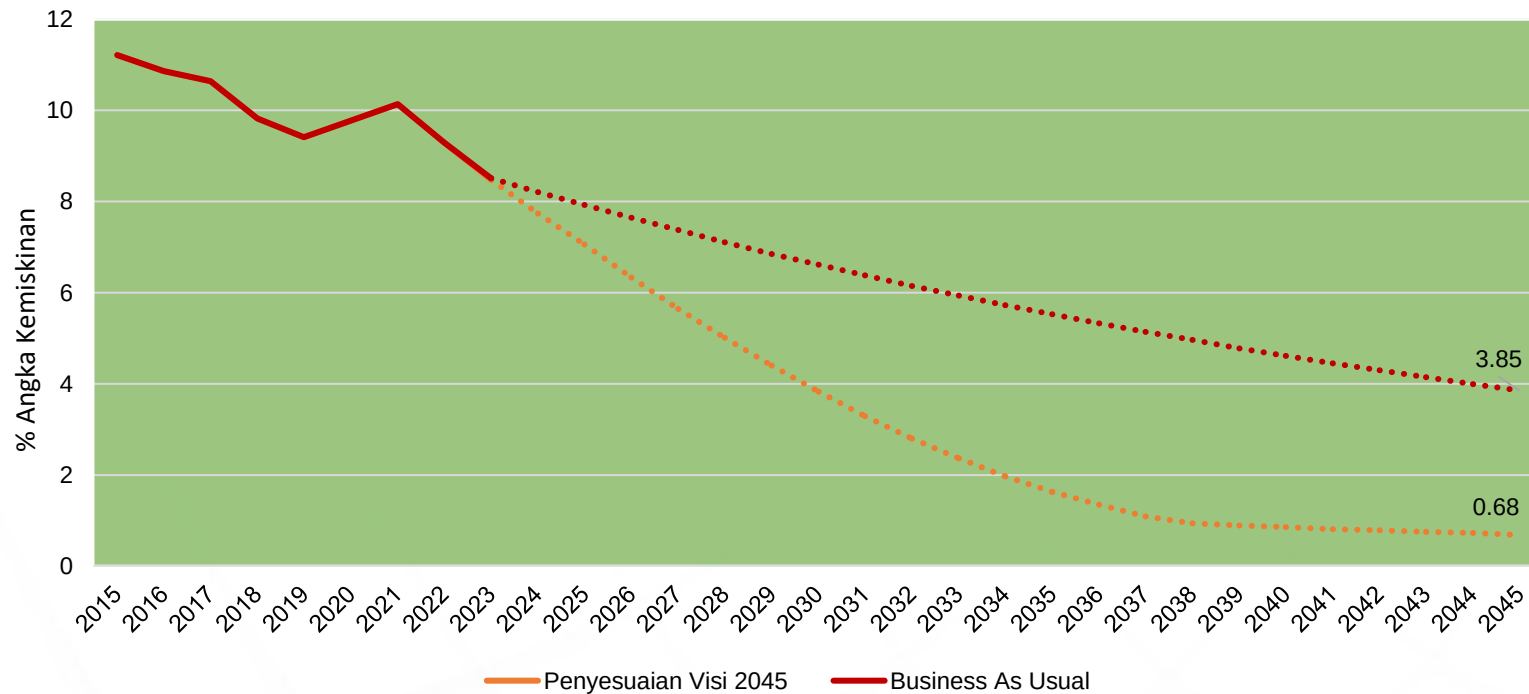


Kementerian PPN/
Bappenas



Kondisi Kemiskinan Nasional Saat Ini dan Trajektori 2025-2045

Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Trayektori hingga 2045 (%)

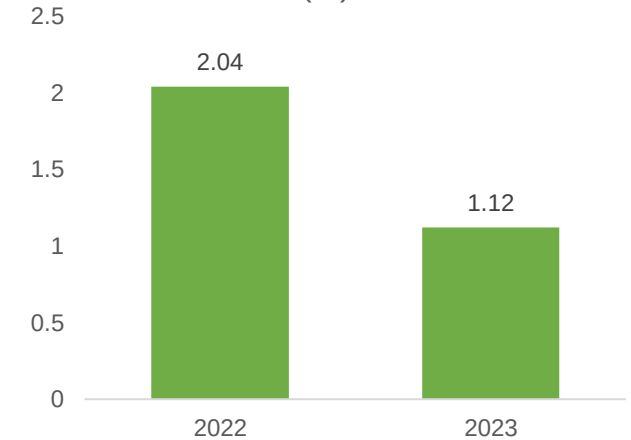


Sumber: Susenas, BPS dan Simulasi Dit. PKPM Bappenas

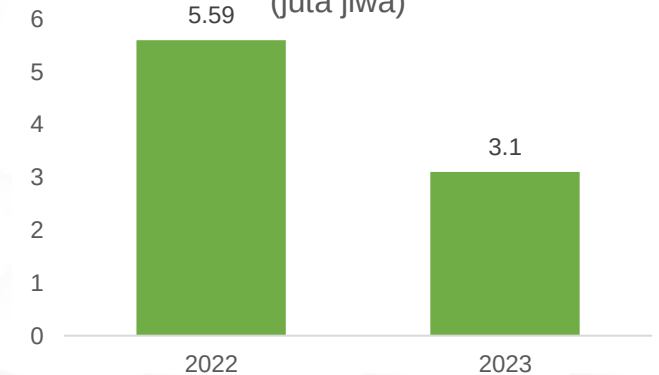
*) Simulasi dihitung berdasarkan penyesuaian Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

- Dengan penajaman kebijakan yang didukung kondisi makro (pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif) maka kemiskinan akan mendekati 0% di tahun 2045, yaitu sekitar 0,68%.
- Perbedaan jumlah penduduk miskin antara *business-as-usual* dan intervensi sekitar 10 juta penduduk.
- Tantangan masih berat yaitu untuk mencapai 0% ekstrem tahun 2024.

Persentase Kemiskinan Ekstrem (%)



Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (juta jiwa)



Sumber : BPS dan Rekomendasi FMS

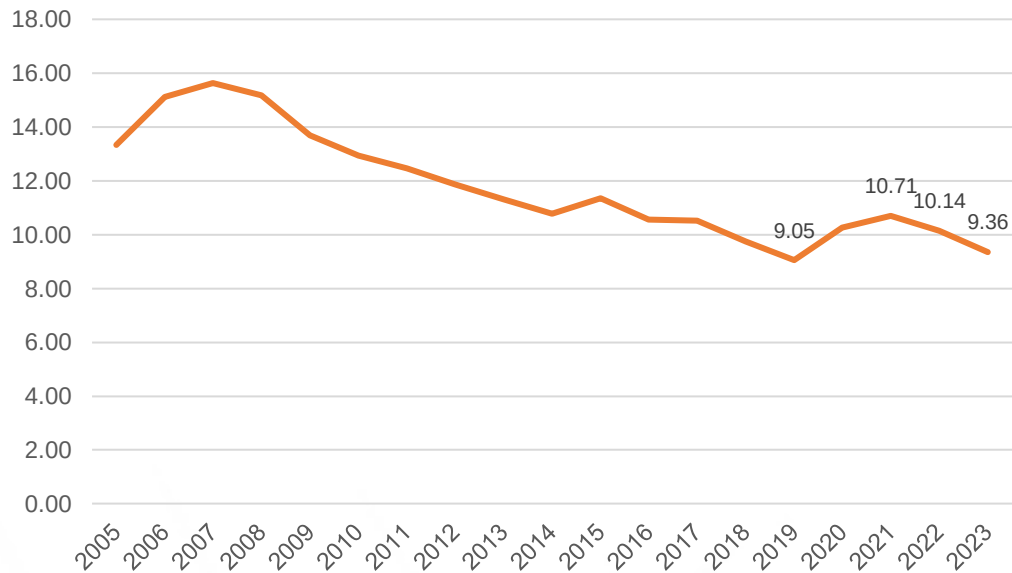


Kementerian PPN/
Bappenas

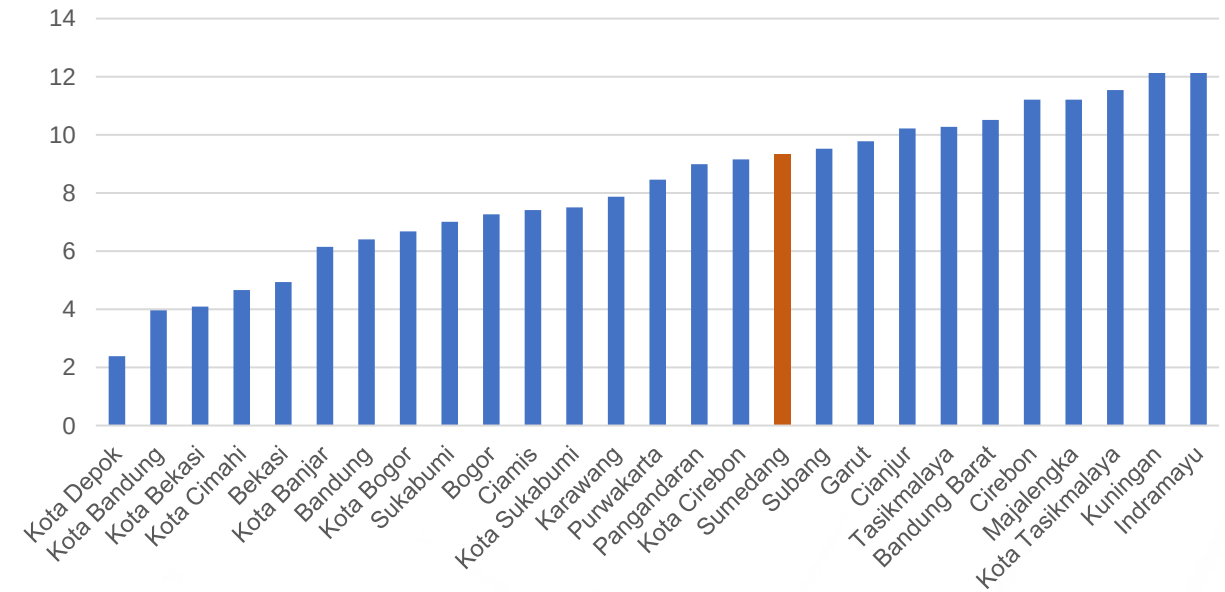


Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumedang

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumedang



Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023 (%)



- Terjadi penurunan tingkat kemiskinan (PO) di Kabupaten Sumedang dalam 20 tahun terakhir dengan rata-rata **sebesar 0,24 persen poin**, meskipun terdapat sedikit kenaikan pada masa pandemi Covid-19.
- Penurunan kemiskinan Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 sangat signifikan sebesar **0,78 persen poin**.
- Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang masih relatif tinggi.



Kementerian PPN/
Bappenas



Tantangan Multidimensi dalam Menurunkan Kemiskinan

KETEPATAN SASARAN PROGRAM

- 
- Program perlindungan sosial masih terfragmentasi, belum optimal menjangkau dan mengidentifikasi secara tepat target penduduk miskin/rentan
 - Akurasi penyaluran program-program perlindungan sosial masih rendah.

PEMUTAKHIRAN DATA

- 
- Pemutakhiran dan perluasan cakupan data yang didukung oleh sistem interoperabilitas.
 - Pendamping yang secara kontinyu memonitor.

KOORDINASI DAN INTEGRASI



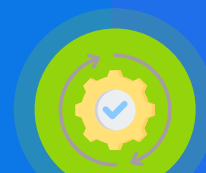
Integrasi dan koordinasi antar sektor dan antar pemerintah pusat maupun daerah belum optimal

PENDANAAN YANG BERKESINAMBUNGAN



Mengembangkan pendanaan untuk program pemberdayaan yang berkelanjutan.

KESINAMBUNGAN DAN KOMPLEMENTARITAS



Integrasi dan komplementaritas antara program bantuan sosial, program pemberdayaan sosial ekonomi, dan rehabilitasi sosial.

PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF



Pembelajaran kejadian bencana (termasuk alam/non-alam/sosial) memperbesar kebutuhan, cakupan, dan manfaat program-program perlindungan sosial (adaptif).



Kementerian PPN/
Bappenas



ASEAN
INDONESIA
2023

Strategi dan Arah Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif dalam RPJPN

STRATEGI

1. **Satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi**
2. Peningkatan usia pensiun bertahap dengan memastikan kesiapan sosial dan ekonomi selama pensiun.
3. Pengembangan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim.
4. Peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam angkatan kerja
5. Penyelarasan peraturan perlindungan sosial.
6. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
7. Integrasi penentuan target, manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat
8. Peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap kelompok rentan
9. Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
10. Inovasi pembiayaan untuk memperkuat & memperluas cakupan integrasi perlintsos yang berkesinambungan utamanya *social impact bonds*, *social impact investment*, dan optimalisasi dana jamsos.

ARAH KEBIJAKAN

Transformasi perlindungan sosial menuju perlindungan sosial yang adaptif diarahkan untuk meningkatkan cakupan perlindungan sosial, bansos berdasarkan status kerentanan, jamsos, dan kesempatan kerja dan berwirausaha kepada seluruh masyarakat baik pada kondisi tanpa bencana maupun dengan bencana.

Untuk Semua Penduduk

- Sesuai siklus hidup
- Seluruh wilayah
- Sesuai kerentanan dan kondisi kesejahteraan

Pada Semua Layanan

- Pengurangan beban pengeluaran Perlindungan berdasarkan kontribusi
- Manfaat tunai dan non tunai (Pemberdayaan dan pelatihan)

Oleh Semua Masyarakat

- Partisipasi swasta & masyarakat
- Partisipasi multisektoral
- Partisipasi pusat-daerah

Perlindungan Sosial yang Adaptif

"Setiap penduduk mendapatkan perlindungan sosial sepanjang siklus hidup yang menghindarkan dari kemiskinan dan mempertahankan kehidupan yang layak"

TARGET 2045

Tingkat Kemiskinan
0,5 – 0,8 %

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
99,5 %

Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal
60 %



Kementerian PPN/
Bappenas



ASEAN
INDONESIA
2023

Perbaikan Data mendorong Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penurunan Kemiskinan Ekstrem





Kementerian PPN/
Bappenas



Melanjutkan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, untuk Peningkatan Kesejahteraan Penduduk

1

TRANSFORMASI DATA MENUJU REGISTRASI SOSIAL EKONOMI

Perbaikan data dan sistem pendataan terintegrasi mencakup seluruh penduduk.

2

PENGEMBANGAN SKEMA PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF

Skema perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap bencana (alam dan non-alam) serta perubahan iklim.

3

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI

Penggunaan berbagai kanal layanan keuangan dalam penyaluran bantuan.

4

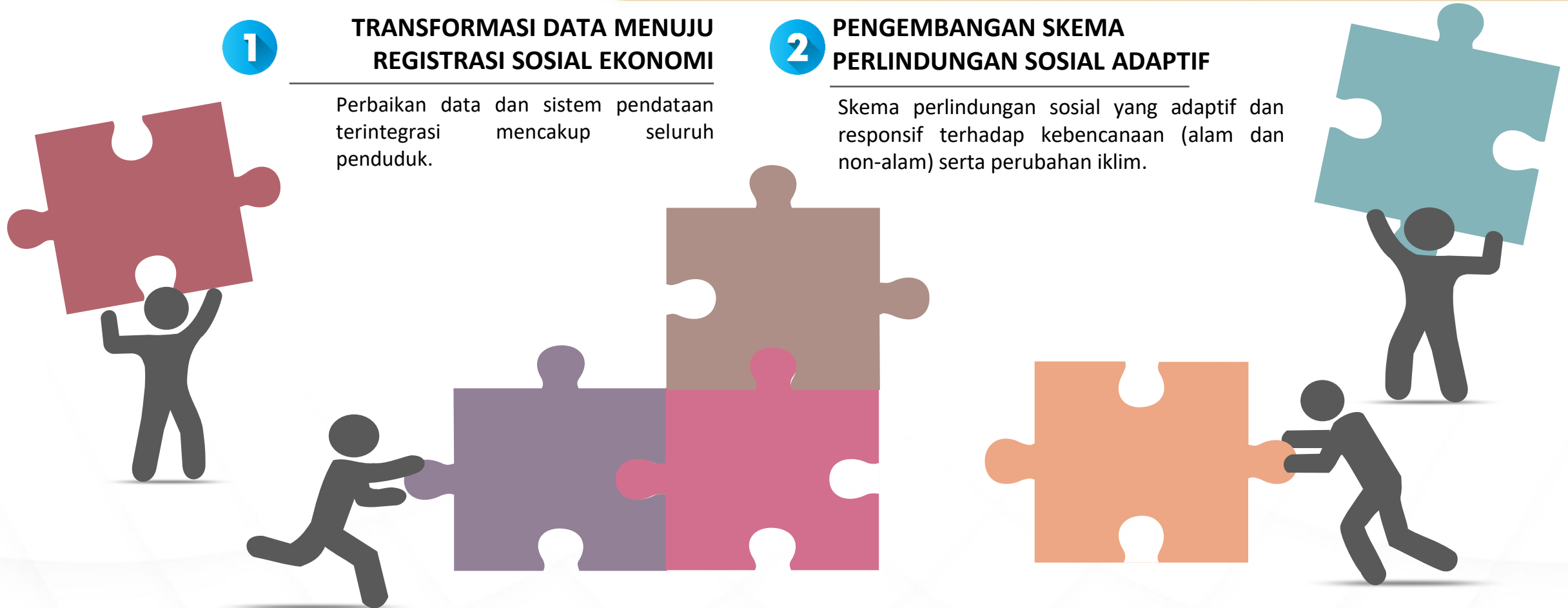
REFORMASI SKEMA PENDANAAN

Pengembangan skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan.

5

INTEGRASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Integrasi dan koordinasi perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan.





Kementerian PPN/
Bappenas



Registrasi Sosial Ekonomi untuk Mendukung Perencanaan dan Penganggaran

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



Pasal 31 UU No 25/2004(SPPN): “Perencanaan pembangunan didasarkan pada **data dan informasi** yang **akurat** dan **dapat dipertanggungjawabkan**”.

- ① Perencanaan berbasis bukti
- ② Penyusunan dan penargetan program
- ③ Peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran



Regsosek mewujudkan perencanaan penganggaran berbasis bukti dengan Satu Data Indonesia.



Kementerian PPN/
Bappenas



ASEAN
INDONESIA
2023

Linimasa Perkembangan Penyelenggaraan Data Regsosek



**Data Registrasi
Sosial Ekonomi**



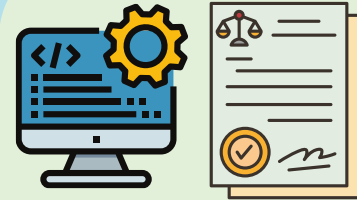
**Pendataan
Regsosek oleh BPS**

Pendataan
dilakukan pada
**15 Okt – 16 Nov
2022.**



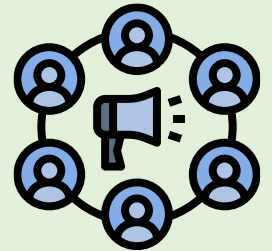
**Penyerahan Data
Regsosek oleh BPS ke
Bappenas**

Penyerahan data
didasari dengan **BAST**
yang ditandatangani
tanggal **11 Agustus
2023**, dengan Nomor:
**B-1482-2/03200/PL.7
14/08/2023** dan
Nomor:
6363/8A5T/06.04/2023



**Penyiapan Sistem dan
Landasan Hukum**

**Penyiapan sarana
prasarana
pengelolaan Data
Regsosek,
termasuk
penyiapan, dan
sistem, SDM, dan
landasan hukum.**



**Penyebarluasan dan
Pemanfaatan Data
Regsosek**

**Bappenas,
Kemendagri,
Kemenkeu, dan
BPS
bertanggung
jawab dalam
Pengelolaan Data
Regsosek.**



Kementerian PPN/
Bappenas



ASEAN
INDONESIA
2023

Kedudukan Data dalam Penyelenggaraan Program

2023

Program
Bantuan
Sosial

DTKS

Kemiskinan
Ekstrem

P3KE

Program
Pendidikan

Dapodik
EMIS

Program
Jaminan
Sosial

Kepesertaan
BPJS

Program
Pemerintah
Lainnya

Data Sektoral/
daerah



Pendataan dan pemutakhiran dilakukan secara **terpisah** dan **belum tersedia mekanisme integrasi** untuk memastikan **pemadanan data**.

2024—dst

Program
Bantuan
Sosial

DTKS

Kemiskinan
Ekstrem

P3KE

Program
Pendidikan

Dapodik
EMIS

Program
Jaminan
Sosial

Kepesertaan
BPJS

Program
Pemerintah
Lainnya

Data Sektoral/
daerah

Integrasi & Padu
padan



Data Regsosek



Data balikan

- Data Regsosek menjadi **data rujukan** untuk pemutakhiran data yang digunakan untuk **pensasaran program pemerintah**. Data sektoral/data daerah memberikan **data balikan**
- Pemutakhiran Data Regsosek dilakukan setiap tahun untuk memastikan ketersediaan basis data yang **mutakhir, akurat, dan terperingkat**.



Kementerian PPN/
Bappenas



ASEAN
INDONESIA
2023

Perkembangan Pendataan Awal Regsosek



Total **150.681** Forum Konsultasi Publik (FKP) telah dilaksanakan di 514 Kabupaten/Kota dan **didapatkan** jumlah keluarga terkonfirmasi:

78.382.866*

*) kondisi data per 12 Juli 2023

85,9% data Regsosek telah dipadankan NIK-nya.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tahap Selanjutnya



Data *by-name by-address*
Hasil Pendataan Awal Regsosek

Bagi pakai dan pemanfaatan data Regsosek dengan optimalisasi **Sepakat**.

Membangun **tata kelola** pemanfaatan Regsosek oleh K/L lintas sektoral dan Pemerintah Daerah.



Kementerian PPN/
Bappenas



ASEAN
INDONESIA
2023

Identifikasi Penerima Manfaat Program Melalui Regsosek

Regsosek mampu mengidentifikasi tingkat ekonomi masyarakat.

Peningkatan Daya Saing



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Pengembangan
dan Pendanaan
Usaha Nelayan



Ekonomi Kreatif
Digital



Program
Pembinaan dan
Promosi UMKM



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Pembinaan
Tenaga Kerja
Mandiri



Program
Kewirausahaan
Pemuda

Pemberdayaan Masyarakat



Perlindungan anak
dalam kondisi
khusus



Program Pemanfaatan
TIK untuk Penyandang
Disabilitas



Pembinaan ketahanan
keluarga rentan &
lansia



Program Ketahanan
Bencana dan
Perubahan Iklim

Perlindungan Sosial dan Layanan Dasar



Program Indonesia
Pintar (PIP)



Program Energi
& Ketenagalistrikan



Program Pelayanan
Kesehatan dan JKN



Program Rehabilitasi
Sosial



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Masyarakat
Menengah ke
Atas



Masyarakat
Rentan



Masyarakat
Miskin

Perluasan
Kesempatan
Kerja Inklusif
dan Adaptif



TERIMA KASIH